



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**

(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang	: 2021 - 2022
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: XIX
Sifat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Acara Rapat	: 1. Sinergitas koordinasi dengan aparat penegak hukum/ sinergitas lintas sektoral 2. Peningkatan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ekonomi serta kendalanya
Hari / tanggal	: Rabu/ 29 September 2021
Waktu	: Pukul 10.30 – 16.25 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat	: Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. / Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris	: Novianti, S.E. / Kepala Bagian Sekretariat Komisi III DPR RI
Hadir	: 1. 1 (satu) orang Pimpinan Komisi III DPR RI 2. 28 (dua puluh delapan) Anggota dari 53 (lima puluh tiga) Anggota Komisi III DPR RI 3. Kepala PPATK beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kepala PPATK dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 10.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. dengan agenda rapat membahas:

- Sinergitas koordinasi dengan aparat penegak hukum/ sinergitas lintas sektoral
- Peningkatan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang dalam penanganan kasus-kasus kejahatan ekonomi serta kendalanya
- Kesimpulan/ Penutup

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang disampaikan oleh Kepala PPATK diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi dan *Grand Strategy* tahun 2022 dan capaian dan evaluasi kinerja tahun 2021
 - a. Evaluasi Rencana Strategis PPATK Tahun 2022
Berdasarkan pemetaan isu-isu strategis dan program prioritas PPATK, maka tema Rencana Kerja PPATK Tahun Anggaran 2022 adalah “Penataan Organisasi PPATK untuk Meningkatkan Penerimaan Negara”, yang diwujudkan dalam:
 - 1) Kelanjutan Implementasi GoAML

- 2) Peningkatan Kualitas Sistem Teknologi Informasi
 - 3) Penguatan regulasi asset recovery
 - 4) Peningkatan Kerjasama Internasional dalam rangka
 - 5) Kelanjutan Proses Keanggotaan Indonesia dalam FATF
 - 6) Peningkatan Tindak Lanjut HA dan HP
 - 7) Pendidikan dan Pelatihan APU/PPT bagi Aparat Penegak Hukum
 - 8) Pelaksanaan Riset APU/PPT
 - 9) Peningkatan Kompetensi SDM PPATK
- b. Capaian dan Evaluasi Kinerja PPATK Tahun 2021
- 1) Realisasi Anggaran Tahun 2021
Realisasi anggaran PPATK sampai 23 September 2021 adalah Rp105.825.775.230 dari pagu Rp105.825.775.230 untuk program dukungan manajemen dan Rp22.953.337.924 dari pagu Rp33.946.398.000 untuk Program Pencegahan TPPU dan Pendanaan Terorisme.
 - 2) Realisasi Kinerja Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama PPATK adalah Indeks efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme Indonesia dengan target 6,16 yang realisasinya akan dinilai pada TW 4.
2. Sinergitas koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam efektivitas penegakan hukum serta inovasi yang akan dilakukan PPATK guna menjamin konsistensi pelaksanaan dalam upaya pencapaian program kerja prioritas.
- a. Sinergitas Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Efektivitas Penegakan Hukum.
- Bentuk sinergitas koordinasi PPATK dengan aparat penegak hukum yaitu:
- 1) Menyampaikan 2.607 Hasil Analisis, 2.327 Informasi, dan 240 Hasil Pemeriksaan kepada lembaga penegak hukum selama periode 2016-2021
 - 2) Bergabung dalam berbagai Satgas Penegakan Hukum
 - 3) Perluasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui putusan Uji Materi UU TPPU oleh Mahkamah Konstitusi
 - 4) Penetapan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT
 - 5) Penetapan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT oleh Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
 - 6) Asistensi penanganan perkara TPPU kepada penegak hukum
 - 7) Sinergitas stakeholders dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU; dan Pelatihan kepada aparat penegak hukum
 - 8) Perkembangan Penyelesaian RUU Perampasan Aset dan RUU
 - 9) Pembatasan Transaksi Uang Kartal
 - 10) Peningkatan Penerapan Pasal Tindak Pidana Pencucuan Uang dalam Penanganan Kasus-Kasus Kejahatan Ekonomi
- b. Inovasi yang Akan dilakukan PPATK guna Menjamin Konsistensi Pelaksanaan dalam Upaya Pencapaian Program Kerja Prioritas
- 1) Koordinasi dengan Aparat Penegakan Hukum (Apgakum) dalam rangka Implementasi GoAML
 - 2) Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (Apgakum) dalam rangka Implementasi Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR)
 - 3) Pembentukan Satgas *Transnational Crime Rapid Response*
 - 4) (TNC2R) yang Beranggotakan PPATK-Polri-PJK Bank

- 5) Pembentukan Satgas Pertukaran Informasi antara PPATK, Ditjen Pajak (DJP), dan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) dengan nama Juanda-Gatot Subroto-dan Rawamangun (JAGADARA)
 - 6) Sinergi Pengawasan Kepatuhan APU/PPT oleh PPATK & Lembaga Pengawas dan Pengatur Kemitraan Strategis Sektor Publik dan Swasta (IntracNet); dan
 - 7) Satuan Tugas dan Aplikasi Data Statistik TPPU
3. Evaluasi maupun inovasi terkait edukasi dan sosialisas iserta pembinaan kepada masyarakat yang dinilai belum dipahami oleh masyarakat dalam rangka mencegah transaksi keuangan mencurigakan.
 - a. Inovasi terkait edukasi dan sosialisasi oleh PPATK:
 - 1) Media Visit
 - 2) Diskusi AML/CFT
 - 3) Kunjungan mahasiswa
 - 4) Penelitian
 - 5) Podcast JUMATAN
 - 6) Layanan keterbukaan informasi publik
 - 7) Infografis dan videografis di media sosial
 - 8) Berita dan siaran pers
 - 9) Festival Kreatif Generasi APU/PPT
 - 10)Pencanangan Forum Kehumasan APU/PPT
 - b. Inovasi terkait edukasi dan sosialisasi oleh PPATK:
 - 1) Pelatihan Penggunaan Aplikasi GoAML
 - 2) Pelatihan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pihak Pelapor
 - 3) Audit Kepatuhan APUPPT
 - 4) *Trade Based Money Laundering*
 - 5) *Financial Technology*
 - 6) Penanganan TPPU dari Tindak Pidana Perpajakan
 - 7) Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Pihak Pelapor

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI mendukung optimalisasi Rencana Kerja PPATK Tahun 2022 khususnya dalam meningkatkan kualitas program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan proliferasi pendanaan senjata pemusnah massal, meningkatkan integritas sistem keuangan dan perekonomian nasional.
2. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh institusi penegak hukum guna meningkatkan pemanfaatan hasil analisis dan hasil pemeriksaan untuk efektivitas penegakan hukum dan pemulihan aset negara; serta menyampaikan matriks Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) yang telah, sedang, dan belum ditindaklanjuti oleh institusi penegak hukum dengan memperhatikan aturan kerahasiaan sehingga dapat menjadi bahan pengawasan Komisi III terhadap institusi penegak hukum.
3. Komisi III DPR RI mendesak PPATK untuk memperkuat kerja sama dengan seluruh panitia seleksi Calon Pimpinan Lembaga atau Pejabat Publik dalam menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh PPATK.
4. Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk melakukan Penilaian Risiko Nasional di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme diseluruh sektor serta memperluas cakupan pemeriksaan dan pengawasan terhadap transaksi keuangan di ruang virtual sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPATK yang diatur dalam Undang-Undang.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.25 WIB

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
WAKIL KETUA,**

Ttd.

Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.
A-514